

Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Wona Yuni Sari¹

wonayunisari03@gmail.com

Isra Maulina²

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

ABSTRACT

Transparency of regional financial management is a key element in realizing good governance. Accurate, relevant, and accountable financial information is very important in government accounting. The role of government accounting in improving regional financial transparency is examined in this study. The results of the study indicate that the implementation of accrual-based Government Accounting Standards (SAP), the use of technology-based financial information systems, and strengthening human resource capacity are important factors in encouraging public information disclosure. However, a number of obstacles are still faced, such as limited technological infrastructure, low understanding of officials, and weak monitoring systems. This study emphasizes that cooperation between institutions, technology, and policies is very important to improve regional financial accountability and transparency.

Keywords: *government accounting, transparency, regional finance, good governance*

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntansi pemerintahan memegang peranan strategis sebagai alat utama dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan, aset, dan kewajiban pemerintah secara akurat dan tepat waktu. Dengan basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat pada saat transaksi terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Ini berbeda dengan metode basis kas, yang hanya mengakui pendapatan saat uang diterima dan beban saat uang dibayarkan. (Salle, 2017)

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi ini memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legal dan administratif, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan aset daerah. (Redaksi, 2013).

Dalam hal ini, masalah utama adalah penerapan sistem informasi keuangan yang berbasis teknologi yang tidak optimal. Karena pelaporan keuangan masih banyak dilakukan secara manual, kesalahan dapat terjadi. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga menjadi hambatan besar. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, sistem pengawasan dan penegakan akuntabilitas bagi aparat pengelola keuangan daerah belum berjalan secara efektif, sehingga praktik penyimpangan dan ketidaktransparanan masih sering terjadi. Pengelolaan keuangan yang jelas dan akuntabel terhambat oleh ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menangani masalah ini secara konsisten. Pada akhirnya, ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang

berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan mereka untuk menjadikannya lebih jelas dan mudah diakses bagi masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi auditor, legislatif daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong kesadaran aparatur pemerintahan terhadap pentingnya penerapan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. (Hadi, 2017)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi ini bertujuan untuk mempelajari konsep teoritis dan penemuan terbaru tentang akuntansi pemerintahan dan transparansi keuangan daerah. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku teks, laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait akuntansi pemerintahan, dan dokumen akademik lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap pemikiran dan praktik yang telah ada, sehingga dapat disimpulkan bagaimana peran akuntansi pemerintahan dalam mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. (Putri & Akbar, 2022)

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. UU ini menekankan prinsip desentralisasi, membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum, serta menetapkan struktur pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Selain itu, gubernur ditunjuk sebagai perwakilan daerah dari pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Mentu & Sondakh, 2016)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa SAP harus menjadi standar untuk penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). menurut Krina (2003), transparansi adalah ukuran utama untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. . Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana publik. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memungkinkannya untuk melakukan kontrol terhadap jalannya kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Aliyah, 2012)

Charlick (dalam Santoso, 2008:130) menggambarkan akuntabilitas sebagai proses di mana pengelola keuangan publik bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengelolaan keuangan, serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan entitas terkait. Selain itu, Kusumastuti dan Lukito (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan dana dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting dari sistem pemerintahan dan pengelolaan perusahaan. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat mengakses dan mengetahui proses serta hasil pengelolaan tersebut secara jelas dan terbuka. Melalui sosialisasi dan pengungkapan informasi yang memadai, transparansi bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Dalam kasus ini, akuntabilitas berarti pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan otoritas pemerintah yang lebih tinggi, tentang tindakan dan penggunaan dana. Pendekatan pemberian akses terhadap semua pihak yang berkepentingan serta hak untuk bertanya dan menggugat penanggung jawab merupakan aspek penting dalam pelaksanaan akuntabilitas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran akuntansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk mempelajari bagaimana pemerintah daerah menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Melainkan menguji hipotesis secara statistik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan analitis berdasarkan data sekunder yang tersedia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya penguatan transparansi keuangan daerah melalui peran akuntansi pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, peraturan perundang-undangan, serta laporan keuangan pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual dipandang sebagai langkah strategis untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat, lengkap, dan relevan. Dengan sistem ini, laporan keuangan tidak lagi hanya berorientasi kas, tetapi mampu menggambarkan posisi keuangan secara menyeluruh, termasuk aset dan kewajiban yang belum direalisasikan secara nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi pemerintahan sangat bergantung pada kesiapan sistem dan kelembagaan yang didukung oleh undang-undang yang kuat. Strategi implementasi yang terencana dengan baik, komitmen dari pemangku kepentingan, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan adalah komponen utama yang mendukung sistem. (Haikal, 2022)

Akuntansi pemerintahan berbasis akrual mencatat semua transaksi dan aktivitas keuangan secara menyeluruh dan tepat waktu, yang membuat pemerintah daerah lebih transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat diandalkan tentang kondisi keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat transparansi, maka akan semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan secara umum. (Budiman et al., 2024)

Secara umum, implementasi akuntansi pemerintahan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan merupakan hasil dari penggunaan sistem akuntansi yang memadai dan sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, penerapan sistem ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam memperkuat akuntabilitas dan good governance di tingkat daerah. (Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani, 2019)

Implementasi akuntansi pemerintahan di tingkat daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual secara nasional dimulai sejak

tahun 2015 dan dipertegas melalui regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Penerapan SAP berbasis akrual telah diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan teknis, dan belum optimalnya sistem pengendalian internal. Di beberapa daerah, proses pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan potensi kesalahan dan keterlambatan pelaporan. (Manossoh et al., 2015)

Peran Laporan Keuangan dan Sistem Informasi dalam Transparansi

Laporan keuangan memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diungkapkan dalam literatur, laporan keuangan yang lengkap dan akurat merupakan basis utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislatif, dan pihak terkait lainnya. Melalui laporan keuangan yang terbuka dan dapat diverifikasi, pemerintah daerah dapat menunjukkan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan mereka. Hal ini sejalan dengan mandat transparansi yang menuntut pemerintah daerah untuk menyajikan data keuangan secara jelas dan jujur, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Laporan keuangan juga berguna untuk pengawasan internal dan pengambilan keputusan strategis serta untuk pelaporan. Akuntansi pemerintahan yang menerapkan standar akuntansi yang berlaku dan mampu menyusun laporan keuangan yang transparan secara berkala membantu dalam mengidentifikasi permasalahan keuangan secara dini dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Transformasi digital dan penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi memainkan peranan penting dalam memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berbagai pemangku kepentingan dapat dengan lebih mudah dan cepat mengakses data keuangan melalui sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan terbuka. Basis data terbuka serta platform digital yang mampu menyajikan laporan secara real-time menjadi tulang punggung untuk mewujudkan transparansi yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, sistem informasi yang mampu menyajikan data keuangan secara akurat, lengkap, dan dapat diakses publik berkontribusi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong akuntabilitas pemerintah daerah. Penataan dan pengelolaan data yang baik juga meminimalisir risiko kesalahan dan manipulasi data, serta mempercepat proses pengawasan dan audit oleh pihak berwenang. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem informasi keuangan juga membuka peluang untuk deteksi dini terhadap potensi penyimpangan keuangan serta memastikan bahwa pengelolaan dana daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip transparansi.

Laporan keuangan yang dibuat menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan (FMIS) sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan sistem informasi ini, data keuangan dapat disajikan dengan lebih akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Ini juga memudahkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan secara otomatis sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Selain itu, keberadaan sistem yang terintegrasi meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah karena memberikan akses yang lebih luas dan transparan kepada seluruh stakeholder, termasuk masyarakat dan pemerintah internal. Secara keseluruhan, laporan keuangan yang disusun secara transparan dan didukung oleh sistem informasi yang efisien merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. (Gaffar, 2024)

Faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi Keuangan

Faktor pendukung utama dalam mewujudkan transparansi keuangan desa meliputi sikap terbuka dan kooperatif dari aparatur desa, termasuk kepala desa yang bersikap terbuka terhadap masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga memudahkan komunikasi yang efektif. Selain itu, pelatihan dan bimtek yang disediakan oleh pemerintah daerah membantu perangkat desa memahami pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan transparansi. Kemudian, penggunaan media informasi seperti spanduk laporan keuangan yang dipasang di depan kantor desa dan penyajian laporan rinci secara terbuka kepada masyarakat juga berperan penting, karena memudahkan warga dalam mengakses dan memahami penggunaan dana desa.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempersulit pencapaian transparansi keuangan desa. Salah satunya adalah seringnya terjadi perubahan Peraturan Bupati (Perbup), yang dapat menimbulkan ketidakpastian aturan dan menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur, seperti minimnya akses internet dan media digital lainnya, juga menghambat penyampaian laporan keuangan secara efektif kepada masyarakat. Selain itu, karena masyarakat tidak tahu cara mengelola dana desa, mereka tidak terlibat dalam melihat dan memahami laporan keuangan. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas aparatur desa yang belum sepenuhnya memadai, meskipun mereka telah mengikuti pelatihan, namun penerapan prinsip transparansi masih mengalami kendala. Dengan demikian, keberhasilan dalam meningkatkan transparansi keuangan desa sangat bergantung pada penguatan faktor pendukung dan upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas aparat dan pengembangan teknologi informasi.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peran akuntansi pemerintahan sangat strategis sebagai sistem informasi yang mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor Pendukung Transparansi Keuangan Daerah

1) Efektivitas Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur keuangan mereka sendiri. Dengan otonomi fiskal, daerah memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengatur anggaran dan belanja publik lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

2) Akuntabilitas Pejabat Publik

Pejabat daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Kebutuhan akan dukungan publik mendorong pejabat untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan dan dapat dipercaya.

3) Persaingan Antar Pemerintah Daerah

Persaingan untuk menarik investasi dan dana pusat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan citra kinerjanya, termasuk transparansi pengelolaan keuangan.

4) Sistem Transfer Dana yang Transparan

Formula kebutuhan dan kinerja daerah digunakan untuk mengatur transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan.

5) Reformasi Sistem Pendapatan Daerah

Upaya diversifikasi basis pajak daerah dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan mendorong pemerintah daerah untuk membangun sistem pencatatan keuangan yang andal dan terbuka.

Faktor Penghambat Transparansi Keuangan Daerah

1) Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat karena keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan ini dapat mengurangi inisiatif daerah untuk mengembangkan sistem keuangan yang mandiri dan transparan.

2) Kompleksitas Regulasi dan Birokrasi

Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta peraturan yang terus berubah dapat menyulitkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang konsisten dan transparan.

3) Kapasitas manajemen yang lemah

Kapasitas manajemen yang lemah dan kualitas sumber daya manusia yang rendah di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan menjadi kendala yang signifikan.

4) Tidak Ada Sistem Pengawasan yang Baik

Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan lembaga eksternal seperti BPK dan DPRD tidak memiliki fungsi pengawasan yang efektif.

5) Keterbatasan Fleksibilitas Anggaran

Pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal secara cepat dan transparan karena kurangnya kebebasan dalam pengambilan keputusan anggaran. Hal ini menurunkan kemampuan akuntansi pemerintah untuk mempromosikan transparansi. (Sari & Kusmilawaty, 2023)

Studi Kasus: Pemerintah Kota Surabaya

Seiring dengan penerapan peraturan akuntansi yang berlaku, seperti PP No. 71 Tahun 2010, dan peraturan terkait lainnya, akuntansi pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya telah berkembang pesat. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan transparan. Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah komponen penting yang meningkatkan kualitas laporan keuangan karena memungkinkan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja secara lebih menyeluruh. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem berbasis teknologi informasi yang terkoneksi langsung dengan berbagai unit di lingkup pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan data keuangan dapat diakses secara real-time dan diperbarui secara otomatis, mengurangi risiko human error serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Pemerintah juga mengadakan pelatihan rutin kepada petugas akuntansi untuk memastikan bahwa mereka memahami prosedur standar dan mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Sistem ini tidak hanya memastikan sesuai dengan regulasi tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada akhirnya, ini akan membantu pemerintah kota mengawasi dan menilai kinerjanya. (Tongotongo et al., 2023)

Studi Perbandingan: dengan Desa Kupa-Kupa Selatan

Kondisi yang sangat berbeda terjadi di Desa Kupa-Kupa Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tongotongo et al. (2023), tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih tergolong rendah. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan masih menjadi masalah bagi Musrenbang Desa, meskipun mereka telah menyelesaikan beberapa langkah. Sistem informasi akuntansi belum diterapkan, pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa dukungan aplikasi keuangan standar. Banyak transaksi tidak memiliki bukti akuntansi yang memadai, dan laporan pertanggungjawaban seringkali mengalami kesalahan karena keterbatasan pemahaman dan pengalaman aparat desa dalam menyusun laporan keuangan. Partisipasi masyarakat juga belum optimal, dan pelibatan publik terbatas pada formalitas. Kapasitas kelembagaan yang kuat tidak diiringi dengan komitmen pemerintah desa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada akuntansi pemerintahan yang profesional, didukung oleh sistem informasi canggih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen. Ketidakhadiran salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan prinsip good governance, dan membuka ruang terhadap praktik-praktik yang tidak akuntabel. (Ambya, 2023)

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan memainkan peranan strategis dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan pemanfaatan sistem informasi keuangan, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu. Hal ini mendorong keterbukaan informasi publik serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Studi kasus di Desa Kupa-Kupa Selatan menunjukkan bahwa kekurangan infrastruktur dan kapasitas aparatur masih menjadi hambatan besar untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi studi kasus di Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan, pelatihan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dapat menciptakan tata kelola keuangan yang transparan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu aparatur daerah memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu,

penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas penting, mengingat peran sistem informasi keuangan yang terintegrasi sangat krusial dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan lembaga pengawasan seperti Inspektorat dan DPRD cukup kuat dan independen. Untuk menghindari tumpang tindih undang-undang yang dapat menghambat pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan, perlu terus diupayakan agar undang-undang diharmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, partisipasi masyarakat harus diperkuat dengan memberikan akses yang luas terhadap informasi keuangan daerah, serta mendorong peran aktif warga dalam pengawasan anggaran guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*.
- Budiman, N. F. S., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2024). N. F. S. Budiman ., H. Manosoh ., H. R. N. Wokas . Analisis Pemanfaatan Aplikasi Fmis (Financial Management Information System) Dalam Memenuhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepu. 12(3), 902–911.
- Fitri Sukmawati, & Alfi Nurfitriani. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Gaffar, M. I. (2024). *Transparansi Keuangan dan Peran Audit Menghadapi Tantangan Era Digital* (Issue July).
- Hadi, S. (2017). Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'*, 9(2), 169–181.
- Haikal, M. F. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Makassar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(April), 89–112.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 71, 160–173. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Manossoh, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara the Implementation of Governmental Accounting System To Initiate Good Government Governance in North Sulawesi Province. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 777.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.
- Putri, A. C. P., & Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 14–25.
- Redaksi, P. (2013). Pengantar Redaksi. *Humanus*, 12(2). <https://doi.org/10.24036/jh.v11i2.2893>
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards to Realize Quality Financial Reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Tongotongo, M. C., Tinangon, J. J., & ... (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal LPPM Bidang ...*, 6(2), 1231–1240. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45343%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/45343/41207>

